



IDEOLOGI, KEKUASAAN, DAN PENGARUHNYA PADA ARAH SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (1950-1965)

Edi Subkhan[✉]

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Mei 2018

Disetujui Juni 2018

Dipublikasikan Juli 2018

Keywords:

*critical pedagogy,
democracy, liberalism,
nationalism, national
education system, socialism.*

Abstrak

Pedagogi kritis memandang bahwa pendidikan tidak lepas dari kekuasaan dan kepentingan politik. Oleh karena itu banyak pedagog kritis mengatakan bahwa pendidikan tidak netral bagi siswa yang sedang belajar dan mengasah kompetensinya di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan arena pertarungan banyak kekuatan, kepentingan politik, dan ideologi. Berdasarkan asumsi tersebut artikel ini menggambarkan sejarah bagaimana ideologi-ideologi dalam wujud kekuasaan dan kepentingan politik mengarahkan sistem pendidikan nasional Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah artikel ini fokus pada periode 1950 hingga 1965 dan menyimpulkan bahwa rezim yang berkuasa waktu itu dan perubahan orientasi ideologis dari masa demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin sangat memengaruhi visi dan arah pendidikan, terutama pada kebijakan pendidikan, perubahan kurikulum, dan pendekatan pembelajaran. Dengan kata lain, pada waktu itu banyak kepentingan politik, kekuasaan, dan basis ideologis berperan sangat besar dalam mengarahkan ulang tujuan sistem pendidikan nasional Indonesia dari Kanan ke Kiri dan sebaliknya dari atas ke bawah.

Abstract

According to critical pedagogy notion, education is always in relation with powers and political interests. It is why many critical pedagogues stated that education is not a neutral site for student to acquire knowledge and competency. Therefore, education is a battle field of many powers, political interests and ideologies. Regarding to this claim this article describes the historical trajectory how ideologies in the form of powers and political interests directing Indonesia's national education system. By employing historical approach this article focuses on the historical period from 1950 to 1965 and conclude that the regime and ideological change from the period of liberal democracy to guided democracy really affect educational vision and direction, particularly in the form of educational policy, curriculum development and learning approach. In other words, in that era political interests, powers and ideological basis have significant role to redirect the goals of Indonesia's national education system from right to the left and vice versa in top down manner.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Gedung A3 Lt. 1 FIP

Unnes, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: edi.subkhan@mail.unnes.ac.id

ISSN 2252-6633

PENDAHULUAN

Ideologi, politik, kekuasaan, dan pendidikan sejatinya adalah hal yang tidak terpisahkan. Para eksponen pedagogi kritis (*critical pedagogy*) sejak lama menyadari hal ini dalam banyak kajian mereka. Michael Apple (2004) misalnya menulis kaitan ideologi dan kurikulum, bahwa ideologi memengaruhi praktik reproduksi ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah, salah satunya dalam wujud kurikulum tersebut (*hidden curriculum*). Dengan kata lain, melalui kurikulum, ideologi tertentu yang mewujud dalam pandangan dunia tertentu, juga nilai-nilai, tradisi, dan bahkan sikap politik tertentu diwariskan untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa-siswi di sekolah. Aronowitz dan Giroux (1987) juga menguraikan adanya tendensi ideologi konservatif, liberal, dan radikal dalam pengembangan dan praktik pendidikan di Amerika Serikat (A.S.). Mereka bahkan pada waktu itu sudah menelaah terdapat ideologi neokonservatisme yang membawa krisis orientasi di perguruan tinggi di A.S.

Namun dalam konteks praksis pendidikan di Indonesia, tampak hanya beberapa akademisi yang pernah mengulasnya secara serius. Di antaranya adalah H.A.R. Tilaar (2009) yang menguraikan bagaimana kekuatan-kekuatan global dan perubahan arah politik nasional setelah reformasi politik 1998, misalnya desentralisasi dan otonomi daerah, memengaruhi arah pembangunan pendidikan nasional Indonesia. Uraian Tilaar menunjukkan bahwa kekuatan global yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial—termasuk pada dunia pendidikan—bukan hanya berupa ekonomi, politik, dan militer, melainkan juga ideologi dan budaya. Beragam wacana ideologis yang ikut dibawa oleh arus globalisasi, antara lain demokrasi, kebebasan, otonomi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan dan keadilan gender, dan lainnya secara faktual sejak awal 2000-an hingga sekarang telah menjadi wacana dominan dalam dunia pendidikan Indonesia dan berkuasa mengarahkan kebijakan pendidikan nasional.

Dalam uraianya yang lain Tilaar (2012) juga menunjukkan bahwa pendidikan berkait erat dengan perubahan sosial, baik perubahan sosial memengaruhi pendidikan maupun sebaliknya. Tilaar bahkan mengelaborasi lebih lanjut pedagogi kritis yang dikembangkan oleh banyak eksponen, terutama Paulo Freire dan kritik-kritik sosial oleh Mazhab Frankfurt dan postmodern menjadi satu rumusan pedagogik transformatif untuk Indonesia (Tilaar lebih memilih menggunakan istilah “pedagogik” dengan “k” dibanding “pedagogi”). Subkhan (2017) menjelaskan bahwa konsepsi pedagogik transformatif H.A.R. Tilaar pada dasarnya adalah upaya membawa pedagogi kritis agar sesuai dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu Tilaar mencoba memadukan pemikiran-pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara dan M. Sjafei dengan pedagogi kritis yang membawa wacana mengenai gender, demokrasi, HAM, dan sejenisnya. Tilaar menunjukkan bahwa ideologi memengaruhi perubahan sosial dan arah pendidikan.

Ideologi, politik, dan kekuasaan memang penting dikaji kaitannya dengan pendidikan, mengingat praktik pendidikan selalu dipengaruhi dan turut memengaruhi ketiganya. Dalam konteks pendidikan nasional, yakni pendidikan yang dikoordinasi oleh pemerintah dalam sebuah negara tertentu pasti didasari oleh visi ideologis tertentu. Hanya saja agak repot dan jarang ada yang menelisik dan menarik benang merah secara tegas dan jelas kaitan antara ideologi dan pengaruhnya pada arah pengembangan pendidikan secara jelas dan empiris, terutama di Indonesia. Ideologi-ideologi tersebut pada hakikatnya mewujud dalam kepentingan politik banyak pihak dan kekuasaan rezim. Indonesia dalam perjalanan sejarahnya menunjukkan bahwa periode tahun 1950-an hingga 1965-an terjadi perubahan drastis yang menarik jika ingin mengetahui pengaruh berbagai ragam orientasi ideologi, politik, dan kekuasaan saling berjalin kelindan dan memengaruhi arah pendidikan nasional. Sayang sejauh penelusuran penulis, kajian sejarah pendidikan pada periode tersebut tidak banyak yang menganalisis dimensi ideologis

serta pengaruhnya bagi arah pengembangan pendidikan nasional.

Barangkali satu artikel menarik yang mengkaji khusus periode tersebut adalah karya McVey (1990) yang mengkaji Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai lembaga pendidikan. Artikel ini menggambarkan sisi lain dari PKI dalam menggalang dan mendidik massa untuk menghayati dan menjalankan doktrin-doktrin ideologis komunisme. Namun artikel itu pun fokus pada PKI saja, bukan pada analisis relasi antara ideologi, kekuasaan, dan pendidikan. Selain itu sejauh ini kajian lain sifatnya lebih umum. Misalnya ulasan Poerbakawatja (1970) lebih fokus pada sejarah umum pendidikan Indonesia dari 1900-an hingga 1970-an serta upaya pemerintah dalam mengembangkan program pendidikan secara umum. Sejarah pendidikan yang bersifat umum lainnya diuraikan oleh Mestoko *et al.* (1986) dan Sjamsudin *et al.* (1993). Kajian kedua tim tersebut merupakan bagian dari proyek Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) pada waktu itu. Kajian lain dilakukan oleh Suradi Hp. *et al.* (1986), namun fokusnya adalah pada pemikiran pendidikan dan kebudayaan dalam rentang sejarah sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1980-an.

Kajian menarik juga dilakukan oleh Jasin (1987), namun fokusnya pada perubahan kurikulum sekolah dasar dari masa ke masa sejak kemerdekaan hingga tahun 1980-an. Selain itu beberapa publikasi yang juga menyasar rentang waktu tahun 1950-an hingga 1965-an adalah karya Tilaar (1995). Karya setebal seribu halaman lebih tersebut dipublikasikan dalam rangka menyambut 50 (lima puluh) tahun pembangunan pendidikan nasional 1945-1995, karena lingkupnya demikian luas maka wajar uraian mengenai pendidikan dalam rentang 1950-1965 diulas sekilas saja dan belum sampai pada analisis ideologis, kekuasaan, dan pengaruhnya pada arah pengembangan pendidikan nasional secara mendalam. Oleh karena kelangkaan referensi yang mengulas mengenai pengaruh dan jalin kelindan antara ideologi, politik, kekuasaan, dan perubahan arah pembangunan pendidikan nasional, maka artikel

ini akan menguraikannya secara lebih rinci. Terutama fokus pada beberapa kebijakan pemerintah dalam rentang tahun 1950-1965.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, terutama mengaju pada Gottschalk (1985: 15) yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik peneliti menelusuri referensi-referensi terkait, yakni yang berkaitan dengan peristiwa dan kebijakan pendidikan pada kurun waktu 1950 hingga 1965 di Indonesia, terutama yang di dalamnya terdapat data dan informasi mengenai substansi dan kepentingan ideologis. Pada tahap kritik referensi-referensi tersebut ditelisik akurasinya dengan pertimbangan keterpercayaan penulis dan sejenisnya. Berikutnya dilakukan interpretasi terhadap referensi-referensi tersebut untuk mencari relasi ideologi, kekuasaan, dan pengaruhnya terhadap arah pengembangan pendidikan nasional menggunakan perspektif kritik ideologi yang banyak digunakan oleh para pedagog kritis. Terakhir pada tahap historiografi peneliti menata secara sistematis hasil analisis atau interpretasi tersebut agar terlihat alur logikanya yang jelas dan mudah dipahami pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebenarnya Riklefs (2005) telah membuat periodisasi masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 hingga 1957, sedangkan demokrasi terpimpin sejak tahun 1957 ketika kali pertama gagasan demokrasi terpimpin dikemukakan Soekarno hingga 1965 ketika berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno. Namun bahasan dalam penelitian ini periodisasi yang digunakan berbeda, yakni demokrasi liberal berlangsung sejak 1950 hingga 1959, sedangkan demokrasi terpimpin sejak tahun 1959, yakni sejak pidato kenegaraan 17 Agustus 1959 hingga 1965. Uraian berikut di bawah ini mengikuti periodisasi yang kedua tersebut, bukan dari Riklefs.

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Indonesia memasuki periode demokrasi liberal sejak tahun 1950, yakni ketika terjadi kompromi politik antara pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Keduanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk sementara menggunakan konstitusi buah kompromi antara Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut Undang-Undang Dasar tahun 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Masa demokrasi liberal ini ditandai oleh menjamurnya partai-partai politik yang saling berkompetisi satu sama lain dalam meraih simpati rakyat dan mencapai kekuasaan politik (Suradi Hp *et al.*, 1986: 101-102). Ricklefs (2005: 480) mengatakan bahwa sistem demokrasi liberal dalam bentuk multi partai yang dijalankan tersebut diinspirasi salah satunya dari sistem yang berlaku di Belanda. Jadi, kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap sebagai representasi partai-partai yang ada.

Sayang kondisi tersebut justru menjadikan pemerintahan tidak stabil. Pertama adalah kabinet Natsir (1950-1951), kemudian kabinet Sukiman (1951-1952), dan kabinet Wilopo (1952-1953), ketiga kabinet yang terbentuk tersebut merupakan koalisi antara Masyumi-Partai Nasional Indonesia (PNI). Berikutnya dibentuk kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1955) yang merupakan koalisi PNI, Nahdlatul Ulama (NU), dan partai-partai kecil lain, dilanjutkan kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) sebagai kabinet koalisi Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan NU, berganti lagi dengan kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua (1956-1957). Berbagai kontroversi muncul dalam pengambilan kebijakan kabinet-kabinet tersebut. Tekanan publik dan politik dari partai-partai oposisi menjadi faktor utama pergantian kabinet. Salah satu puncak perpecahan terjadi bukan hanya di kabinet, namun merembet ke pucuk pimpinan negara, yakni ketika Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada 20 Juli 1956 (Ricklefs, 2005: 481-502).

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka hal yang diutamakan tentu membangun tata kelola negara yang baik. Terlebih sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Belanda terlihat bersikukuh untuk kembali menjajah Indonesia melalui pendudukan militer di beberapa tempat dibantu tentara Inggris setelah berhasil meminta Jepang menyerah dalam Perang Dunia II. Perlawanan bersenjata pun terjadi pada Oktober, November, hingga Desember 1945 di Jawa dan akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Selain itu beberapa perlawanan masih terjadi di beberapa tempat di Sumatera, Bali, dan lainnya. Gesekan antar-faksi perjuangan kemerdekaan juga terjadi, ditambah upaya Belanda untuk memaksakan diwujudkannya negara federasi (Ricklefs, 2005: 428-468). Perpindahan Ibu Kota karena terdesak oleh kehadiran kembali militer Belanda dan berbagai gesekan di internal antar-faksi pejuang menjadikan pemerintah Indonesia yang baru berdiri kerepotan.

Dilihat dari pembangunan bidang pendidikan, maka peristiwa-peristiwa tersebut menjadikan upaya membangun satu fondasi sistem pendidikan nasional yang kuat tidak dapat terlaksana karena disibukkan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya pendudukan Belanda dan perpecahan di antara beberapa faksi di Indonesia sendiri. Oleh karena itu pengembangan pendidikan sejak tahun 1950 fokusnya adalah bagaimana mengatasi problem yang ada dan berupaya membangun fondasi sistem pendidikan nasional yang kokoh. Dalam hal ini problemnya adalah banyaknya rakyat yang belum terdidik dan adanya sekolah-sekolah yang sebelumnya berada dalam wilayah RIS. Pengembangan infrastruktur, penyelenggaraan sekolah rakyat diperbanyak, integrasi sekolah-sekolah RIS ke dalam sistem pendidikan Indonesia, dan merumuskan dasar kebijakan perundang-undangan sistem pendidikan nasional menjadi prioritas pemerintah waktu itu (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 41-44).

Berkaitan dengan pendidikan, produk hukum yang dapat dirumuskan adalah Pengumuman Bersama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) RIS dan Republik Indonesia (RI) pada 30 Juni 1950. Pihak RIS diwakili J. Leimena dan RI diwakili Sarmidi Mangunsarkoro. Substansi pengumuman tersebut adalah upaya awal integrasi sistem dan sekolah-sekolah RIS ke dalam sistem RI mengenai susunan sekolah-sekolah negeri dan swasta. Berikutnya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Jawatan Inspeksi Pengajaran, Kementerian PP dan K pada 25 Agustus 1950 mengeluarkan ketentuan perubahan sekolah-sekolah yang awalnya mengikuti model Belanda terutama di wilayah di bekas RIS diubah mengikuti sistem pendidikan nasional. Kebijakan lainnya lebih bersifat teknis operasional dalam rangka menata sistem pendidikan nasional, antara lain memperbaiki jenjang pendidikan, mengembangkan pendidikan calon guru, dan pendidikan tinggi (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 58-70; Suradi Hp *et al.*, 1986: 51-79).

Secara ideologis, pengembangan pendidikan pada masa demokrasi liberal dipengaruhi oleh ideologi dan praktik demokrasi liberal. Mengacu pada uraian Suradi Hp. *et al.* (1986: 103) demokrasi liberal berwujud sistem multi partai berakibat pada jatuh bangunnya kabinet dan ketidakstabilan politik dalam negeri. Sebab empirisnya bermacam-macam, namun sistem multi partai yang merupakan wujud demokrasi liberal tersebut menjadikan pengembangan pendidikan seolah-olah kehilangan arah dan pijakan ideologisnya. Terlebih UUD yang dipakai dalam kurun waktu 1950 hingga 1959 adalah UUDS kompromi RIS dan RI. Secara tidak langsung dengan demikian demokrasi liberal menjadikan pengembangan pendidikan nasional Indonesia belum jelas arahnya ke mana. Belum lagi ditambah orientasi pengembangan pendidikan di awal-awal masa kemerdekaan (1945-1949) dan dilanjutkan di masa demokrasi liberal adalah hal-hal yang sifatnya pemenuhan hal-hal dasar seperti

infrastruktur dan memperbanyak layanan pendidikan.

Lebih lanjut orientasi ideologis yang muncul dan memengaruhi arah pengembangan pendidikan di masa demokrasi liberal pada dasarnya dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua), yaitu (1) nasionalisme dan (2) demokrasi. Nasionalisme dalam hal ini adalah perwujudan dari perjuangan melepaskan diri dari penjajahan Belanda pada periode sebelumnya dan upaya membangun identitas dan karakter bangsa Indonesia yang penting dibangun di masa awal-awal kemerdekaan. Di sisi lain demokrasi menjadi tujuan gambaran masyarakat Indonesia yang digaungkan sejak tahun 1920-an (lihat Tsuchiya, 1992). Semangat dan paham demokrasi tersebut akhirnya beririsan dengan sistem demokrasi liberal yang sedang dijalankan sejak 1950. Secara eksplisit kedua orientasi ideologis tersebut terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1950, yakni pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia bersifat nasional dan demokratis, berbeda dengan sistem pendidikan warisan Belanda yang diskriminatif (Poerbakawatja, 1970: 353).

Pada bagian penjelasan umum nomor 9 (Sembilan) diuraikan bahwa yang dimaksud bersifat nasional artinya pendidikan Indonesia harus didasarkan pada kebudayaan Indonesia sendiri. Dalam hal ini mata pelajaran sejarah menjadi penting untuk membangun rasa percaya diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Begitu juga dengan pembelajaran seni tari dan sejenisnya, termasuk penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, untuk membangun jiwa nasionalis siswa. Berikutnya, penjelasan nomor 10 (sepuluh) yang dimaksud pendidikan nasional harus demokratis adalah mengarahkan pembelajaran di sekolah secara demokratis, hingga nanti akan membentuk siswa-siswi yang juga demokratis. Wujudnya, yakni bukan pendidikan yang membahukan siswa penurut jika diperintah, melainkan memiliki kemauan, inisiatif, dan kemerdekaan menentukan sikap sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, pendidikan demokratis tidak sama

dengan pendidikan anarki (lihat juga Poerbakawatja, 1970: 65).

Uraian bahwa pembelajaran diarahkan untuk menggunakan pendekatan demokratis sangat menarik, karena uraian tersebut menunjukkan bahwa orientasi ideologi demokrasi tidak sekadar menjadi jargon dan semangat dalam arah makro kebijakan pendidikan nasional saja, melainkan juga diupayakan untuk diperlakukan di kelas-kelas. Di ruang-ruang kelas ideologi tersebut menjelma menjadi strategi, metode, dan model-model pembelajaran. Tidak seperti ketika ideologi didiskusikan secara gamblang di forum maupun kelas yang memang diarahkan untuk membicarakan dan mempelajari ideologi, ketika ideologi sudah menjelma menjadi strategi, metode, dan model-model pembelajaran maka sejatinya ideologi sudah diperlakukan. Dengan kata lain, ideologi yang mulanya ada di wilayah ide atau gagasan diperlakukan dalam bentuk strategi, metode, dan model-model pembelajaran di kelas. Ketika diperlakukan maka arahnya adalah mencapai tujuan dari ideologi tersebut, dalam konteks ini adalah demokrasi.

Pada penjelasan umum UU No. 4 Tahun 1950 pasal 4 mengenai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran juga dinyatakan bahwa dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas negara yang termaktub dalam UUD 1945 yang familiar disebut dengan Pancasila. Selain itu juga harus berdasarkan kebudayaan kebangsaan agar pendidikan dan pengajaran dapat memenuhi tugasnya sebaik-baiknya. Pasal ini menguatkan orientasi ideologis nasionalisme dalam pendidikan Indonesia waktu itu. Di sisi lain orientasi ideologis demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Poerbakawatja (1970: 102) terdapat dalam UU No. 4 Tahun 1950 juncto No. 12 Tahun 1954. Misalnya pada pasal 10 bab VII tentang kewajiban belajar, pasal 14 bab IX mengenai subsidi untuk sekolah-sekolah swasta, pasal 19 bab XI tentang sokongan untuk siswa pandai yang tidak mampu secara ekonomi, juga pasal 22 bab XIV tentang tiadanya pungutan untuk uang sekolah dan alat-alat pelajaran untuk sekolah rendah dan sekolah luar biasa.

Selain itu Poerbakawatja (1970: 103) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan nasional juga telah membuka kesempatan bagi semua anak dari berbagai kalangan untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya hingga perguruan tinggi, asalkan memenuhi syarat. Lebih dari itu demokrasi juga menjadi dasar pengembangan kebebasan mimbar akademik (*academic freedom*) di perguruan tinggi. Secara umum tujuan pendidikan nasional memang sudah terdapat pada UU No. 4 Tahun 1950 pasal 3 bab II yang berbunyi "Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Arah tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya diperjelas dan eksplisitkan dalam pasal-pasal dan penjelasan umum, serta beberapa kebijakan lain turunan dari undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, selain pengaruh demokrasi liberal yang menjadikan arah pengembangan pendidikan nasional tidak tuntas karena jatuh bangun kabinet, juga terdapat orientasi ideologi nasionalisme dan demokrasi dalam arah sistem pendidikan nasional Indonesia, bahkan di sisi lain masa demokrasi liberal juga diidentifikasi turut membawa paham liberal di masyarakat. Suradi Hp. et al. (1986: 45-46) misalnya menyatakan bahwa capaian kuantitatif pendidikan pada tahun 1950-an awal memang bagus, namun yang bermasalah adalah sisi kualitasnya. Ia menyatakan bahwa substansi pendidikan yang berjalan lebih condong pada paham liberal dan menjauh dari semangat menuju masyarakat adil berdasarkan Pancasila. Paham liberalisme dalam pendidikan menghasilkan beberapa hal yang kurang menguntungkan.

Pertama, ruang publik pendidikan dan kebudayaan justru menjadi ajang konflik antar-ideologi yang berbeda-beda, hal itu terjadi karena sistem multi partai dalam demokrasi liberal. Pengiriman guru dan dosen ke luar negeri juga menimbulkan masalah ketika mereka mencoba menerapkan ilmunya begitu saja ketika kembali ke Indonesia. *Kedua*,

munculnya intelektualisme dan verbalisme, hal itu karena pendidikannya masih berkiblat ke Eropa Barat yang menekankan dimensi akademik dan membawa perubahan pembelajaran verbalistik serta meluasnya feudalisme yang menjunjung sekolah umum dan kurang memperhatikan sekolah kejuruan. *Ketiga*, timbulnya individualisme, berupa keinginan anak-anak muda bersekolah untuk memperoleh ijazah sebagai bekal bekerja. Dalam pembelajaran siswa-siswi jadi lebih mementingkan diri sendiri dan mata pelajaran yang akan diujikan pada waktu ujian. Kegiatan kemasyarakatan, juga pelajaran seni dan olah raga dikesampingkan. *Keempat*, muncul banyak sekolah swasta yang didasari oleh paham kapitalisme, yakni mencari untung (profit) dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah. *Kelima*, timbulnya rongrongan terhadap kebudayaan nasional, karena dalam sistem demokrasi liberal, masyarakat bebas mengembangkan kebudayaan sendiri. Buahnya adalah: kebudayaan nasional terancam dengan masuknya budaya asing di Indonesia (Suradi Hp. et al. 1986: 46-47).

Merujuk pada laporan “Dua Puluh Tahun Indonesia Merdeka Bidang Pendidikan dan Kebudayaan” Suradi Hp. et al. (1986: 80) mengatakan bahwa periode 1950/51 hingga 1959 adalah periode yang penuh dengan paham liberal. Ia menulis:

Di bidang kebudayaan liberalisme membawa kemerosotan. Nampak sikap orang kebarat-baratan, baik dalam cara berpakaian, penggunaan bahasa, pemilihan bacaan, maupun tontonan yang digemari. Dansa dihidupkan, musik ngak-ngik-ngok banyak diperdengarkan, para remaja suka berpakaian mini, suka bacaan cabul atau bermoral rendah. Pada umumnya mereka meremehkan yang serba asli Indonesia dan menjunjung tinggi yang serba luar negeri.

Hal tersebut menurut Suradi Hp. et al. (1986: 80) salah satunya karena dalam UUDS 1950 pasal 40 ditetapkan bahwa pengusa melindungi “kebebasan” mengusahakan kebudayaan serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pemerintah tidak leluasa untuk mencegah masuknya budaya, nilai-nilai, dan tradisi Barat yang liberal

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di perkotaan. Jika dilihat dari sisi sejarah, tahun 1950-an memang tahun-tahun awal setelah pergolakan bersenjata dan diplomasi melawan kolonialisme selesai, dan upaya untuk membangun sebuah negara dan bangsa yang maju memerlukan bantuan Barat. Mulai masuknya nilai-nilai Barat melalui film-film, musik, dan juga ilmu pengetahuan yang dibawa oleh para pelajar yang kembali dari Barat turut memengaruhi kultur di masyarakat dan dunia pendidikan. Namun agaknya terlalu simplistik jika menyimpulkan bahwa pendidikan yang didasari semangat ideologis nasionalisme dan demokrasi dengan tetap berpegang pada Pancasila dan kebudayaan kebangsaan telah membawa perubahan cara pandang dan kultur serta nilai-nilai liberal di masyarakat.

Hal tersebut karena secara faktual pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat arah yang jelas ke mana pengembangan pendidikan harus diarahkan. Hanya saja ketidakstabilan politik, ekonomi, juga masuknya budaya Barat melalui berbagai media telah menjadikan upaya-upaya pemerintah tersebut tidak optimal. Demokrasi liberal yang dijalankan oleh pemerintah RI waktu itu memang menyediakan ruang besar dan longgar bagi munculnya berbagai inisiatif budaya, termasuk yang datang dari Barat, sehingga tidak mengherankan jika nilai-nilai liberal muncul di masyarakat. Dunia pendidikan tentu juga terpengaruh, karena pada hakikatnya pendidikan tidak lepas dari pengaruh kultur dominan yang berkembang di masyarakat (lihat Giroux, 1983: 128-167). Agaknya lebih tepat jika disimpulkan bahwa merebaknya nilai-nilai liberal bahkan kapitalisme di masyarakat justru bukan semata-mata karena orientasi demokrasi dalam pendidikan nasional sebagaimana dicantumkan dalam penjelasan UU No. 4 Tahun 1950, melainkan diakibatkan oleh praktik demokrasi liberal yang longgar terhadap semua nilai dan budaya, termasuk yang datang dari Barat.

Jika ditelisik secara historis, dengan jumlah guru yang terbatas, termasuk kualitasnya

juga disinyalir belum banyak yang betul-betul kompeten (lihat uraian Suradi Hp. *et al.*, 1986: 57-63; Sjamsuddin *et al.*, 1993: 61-63), agaknya upaya untuk menjalankan pembelajaran yang didasari semangat dan orientasi ideologis nasionalisme dan demokrasi akan menemui kesulitan di kelas-kelas. Terlebih jika melihat sistem pendidikan yang belum stabil, juga struktur kurikulum dan pelajaran yang belum sempurna dalam Rencana Pelajaran 1947 dan Rencana Pelajaran Terurai 1952 (lihat uraian Jasin, 1987: 127-131; Suradi Hp. *et al.*, 1986: 128). Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Suradi Hp. *et al.* (1986: 45-46) bahwa capaian terbaik di masa demokrasi liberal adalah sisi kuantitas (jumlah sekolah, guru, pendidikan calon guru, dan lainnya bertambah), sedangkan capaian kualitas (ideologi, nilai-nilai, tradisi) belum terlihat jelas (Suradi Hp. *et al.*, 1986: 45-46). Dengan demikian, lahirnya kultur dan nilai-nilai liberal dan kapitalis tidak secara langsung didorong oleh sistem pendidikan dan praktik pembelajaran di sekolah, melainkan oleh situasi dan kondisi demokrasi liberal dan problem dunia pendidikan di awal kemerdekaan itu sendiri.

Namun apapun itu pada masa demokrasi liberal semangat dan orientasi ideologi demokrasi liberal, juga demokrasi dan liberalisme sendiri, serta di sisi lain semangat anti-kolonialisme, nasionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya bangsa secara nyata saling berkontestasi satu sama lain. Baik UUDS 1950, UU No. 4 Tahun 1950, juga beberapa kebijakan lain yang sifatnya lebih operasional menjadi bukti kontestasi ideologi tersebut pada tataran kebijakan resmi pemerintah. Dengan kata lain, pendidikan telah diarahkan oleh ideologi-ideologi tersebut. Pada periode ini pula dengan demikian Pancasila dan UUD 1945 posisi dan perannya terombang-ambing antara ada dan tiada walau sudah dicantumkan dalam UU No. 4 Tahun 1950 pasal 4. Hal itu terjadi karena pemerintah RI masih menggunakan UUDS 1950, adanya ketidakstabilan pemerintahan akibat sistem multi partai yang rentan konflik dan membuat

kabinet jatuh bangun, dan masuknya nilai-nilai dan kultur Barat di masyarakat.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Kondisi ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunan dalam segala bidang, termasuk pendidikan, juga gagalnya perumusan undang-undang dasar baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 1955 membuat Soekarno mengambil putusan radikal. Pada 5 Juli 1959 ia mengeluarkan Dekrit Presiden yang disusul pembubaran kabinet Djuanda, membentuk lembaga-lembaga negara sesuai dengan UUD 1945 yang diberlakukan kembali, dan langkah strategis lainnya. Kemudian pada 17 Agustus 1959 Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita". Pidato inilah yang disebut sebagai manifesto politik atau familiar disingkat menjadi Manipol (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 71-73). Peristiwa tersebut sebenarnya adalah puncak dari lontaran gagasan Soekarno mengenai perlunya sebuah tatanan demokrasi yang berbeda dari demokrasi liberal yang telah berjalan sebelumnya. Sistem tersebut ia beri nama "demokrasi terpimpin" yang telah ia lontarkan sejak 1957 (Riklefs, 2005: 498).

Pada pidato yang sering dirujuk sebagai tonggak berlakunya demokrasi terpimpin (17 Agustus 1959) tersebut Soekarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin dengan menyeru kembali pada semangat revolusi, keadilan sosial, dan pelengkapan lembaga-lembaga negara demi revolusi yang berkesinambungan (Riklefs, 2005: 527). Dalam uraian Riklefs (2005: 527) uraian mengenai Manipol tersebut pada awal tahun 1960-an ditambah menjadi akronim Manipol-USDEK, kata USDEK merupakan singkatan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK). Manipol-USDEK kemudian menjadi doktrin ideologis yang mengarahkan orientasi politik dan pembangunan Indonesia ke arah yang berbeda dari masa demokrasi liberal. Terlihat bahwa Manipol-USDEK dasar

ideologisnya adalah sosialisme ala Indonesia yang di banyak kesempatan Soekarno menyebutnya sebagai Marhaenisme.

Upaya “banting stir”—istilah yang sering digunakan Soekarno yang menggambarkan belok arah secara drastis—dari demokrasi liberal ke sosialisme sebenarnya hal yang wajar. Mengingat kekecewaannya terhadap demokrasi liberal yang membawa arus cara pandang, budaya, dan nilai-nilai Barat, meniscayakan dirinya harus mencari arah dan pegangan yang sama sekali berbeda. Upaya tersebut membawanya kembali pada semangat mudanya dulu yang gandrung dengan gagasan-gagasan besar sejak tahun 1920-an, termasuk gagasan-gagasan kritis Marxisme yang secara ideologis menjadi lawan tanding wacana liberalisme dan kapitalisme. Secara dialektis pula Soekarno dalam upaya membangun dan mengelola kekuasaannya di masa demokrasi terpimpin kemudian mengelaborasikan antara nasionalisme, Islam, dan Marxisme menjadi satu. Gagasan tersebut disebut dikenal sebagai doktrin nasionalisme, agama, dan komunis yang disingkat Nasakom. Tampak hal itu merupakan upaya Soekarno untuk membangun satu pemerintahan yang kokoh terdiri dari komponen nasionalis dari Partai Nasional Indonesia (PNI), agama dari Nahdlatul Ulama (NU), dan komunis dari Partai Komunis Indonesia (PKI) (Ricklefs, 2005: 529-531).

Lalu di manakah Pancasila dan UUD 1945? Mengapa upaya untuk mengoreksi total demokrasi liberal tidak kembali saja ke UUD 1945 dan Pancasila, melainkan membuat rumusan baru yang disebut Manipol-USDEK? Betul bawah unsur UUD 1945 menjadi bagian dari akronim USDEK, namun tampak tidak terlihat daya kekuatannya, demikian juga dengan Pancasila. Jika melihat pada penjelasan mengenai beberapa kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, maka tampak bahwa Soekarno dengan Manipol-USDEK tidak hendak meninggalkan Pancasila. Ia pada dasarnya sedang memaknai dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 menggunakan perspektif Manipol-USDEK, atau secara ekstrem dapat dikatakan Soekarno sedang

menggunakan perspektif ideologis Marxisme-sosialisme dalam memahami dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945. Secara lebih halus Sjamsuddin *et al.* (1993: 79) menyatakan bahwa Pancasila ditempatkan sebagai sesuatu yang sifatnya filosofis, sedangkan Manipol-USDEK sebagai asas operasionalnya.

Nuansa dan orientasi ideologis Kiri tersebut tampak bukan hanya dalam akronim USDEK (Sosialisme Indonesia) dan pada jargon-jargon revolucioner yang sering dilontarkan Soekarno ke muka publik, melainkan juga dalam kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini Soekarno sadar bahwa pendidikan merupakan alat strategis yang harus digunakan untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Oleh karena itu ia segera melakukan langkah-langkah strategis dengan mengeluarkan beberapa kebijakan secara bertahap. Kebijakan pertama yang dikeluarkan yaitu Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Dalam kebijakan tersebut dikemukakan bahwa pendidikan harus difungsikan sebagai (1) sarana membina manusia Indonesia baru yang berakhhlak tinggi, (2) produsen tenaga kerja dalam semua bidang dan tingkatan, (3) pengembang kebudayaan nasional, (4) pengembang ilmu pengetahuan teknik dan fisik/mental, dan (5) lembaga penggerak seluruh kekuatan rakyat (Tilaar, 1995: 101).

Ketetapan MPRS tersebut secara eksplisit juga menempatkan pendidikan sebagai hal penting, yaitu alat revolusi bangsa Indonesia. Pendidikan diarahkan agar tidak menghasilkan manusia liberal yang bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 79). Dalam hal ini Suradi Hp *et al.* (1986: 113-115) menambahkan bahwa Manipol-USDEK dirumuskan oleh Soekarno sebagai penegasan mengembalikan revolusi Indonesia sesuai dengan semangat 17 Agustus 1945 untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Oleh karena itu, pendidikan menjadi alat utama untuk mewujudkannya. Dengan kata lain pendidikan diarahkan untuk menghasilkan

kader-kader yang dapat berkontribusi bagi terwujudnya masyarakat sosialisme Indonesia untuk melenyapkan segala bentuk eksploitasi dan penindasan. Di sini jika kita amati, pilihan istilah seperti “revolusi” dan “amanat penderitaan rakyat” diliputi oleh nuansa perjuangan melawan kolonialisme dan kapitalisme serta pro pada rakyat kecil. Nuansa ini dapat ditelisik akar semangatnya adalah pada ideologi sosialisme

Nuansa sosialisme yang dielaborasikan dengan semangat perjuangan anti-kolonialisme dan nasionalisme juga tampak pada penjelasan mengenai visi Manipol-USDEK. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) visi utama Manipol-USDEK, yaitu (1) membangun semangat nasionalisme dan patriotisme, (2) membentuk masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual dalam bingkai NRKI, (3) menjadi sarana pembentukan wacana dan suasana persahabatan yang harmonis antara Republik Indonesia dan negara-negara Asia-Afrika atas dasar saling menghormati dan bekerjasama membentuk satu dunia baru yang lepas dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian abadi, dan (4) menjadi wahana lahirnya ide-ide dan konsepsi baru untuk membina perkembangan kebudayaan nasional (Suradi Hp. *et al.* (1986: 114-115). Elaborasi semangat anti-kolonialisme, nasionalisme, dan sosialisme Soekarno tersebut gemanya bahkan tidak hanya memenuhi ruang-ruang publik di Indonesia, melainkan juga membangkitkan semangat perjuangan yang sama di negara-negara Asia-Afrika.

Kebijakan tersebut segera disusul oleh beberapa kebijakan lain sebagai penjelasan, pelengkap, dan panduan operasional Manipol-USDEK dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Dalam hal ini lahir kebijakan Sapta Usaha Tama kemudian ditetapkan sebagai ajakan bagi para pendidik dan pelajar untuk kembali pada semangat dan jiwa Proklamasi agar dapat menjadi pelopor dan contoh baik bagi masyarakat. Sapta Usaha Tama yang dijabarkan melalui Instruksi Menteri Muda PP & K No. 1/1959 berisi 7 (tujuh) program, yaitu (1) penertiban aparatur dan usaha-usaha

Kementerian PP dan K, (2) menggiatkan kesenian dan olah raga, (3) mengharuskan “usaha halaman”, (4) mengharuskan penabungan, (5) mewajibkan usaha-usaha koperasi, (6) mengadakan “kelas masyarakat”, dan (7) membentuk “regu kerja” di kalangan Sekolah Lanjutan Atas (SLA) dan universitas (Suradi Hp. *et al.* (1986: 117). Namun jika kita cermati, kebijakan tersebut sejatinya baru berupa program-program strategis dan taktis belaka, belum merupakan satu upaya membangun fondasi sistem pendidikan nasional yang kuat dan kokoh.

Karakteristik strategis dari program-program tersebut dapat dilihat dalam beberapa instruksi pemerintah yang merupakan penjabarannya. Misalnya instruksi mengenai “usaha halaman”. Program ini tampak sangat kental nuansa untuk membangun kemandirian dan kedaulatan masyarakat. Hal itu karena yang dimaksud dengan usaha halaman adalah usaha untuk dapat membantu terpenuhinya kebutuhan ekonomi dengan memberdayakan halaman rumah atau sekolah. Misalnya dengan bertanam singkong, jagung, ubi, kacang, sayuran, buah-buahan, dan lainnya. Dapat pula dijalankan peternakan, perikanan, dan kerajinan tangan. Di sekolah, praktik usaha halaman dilakukan di luar jam pelajaran, jika siswa tidak melakukan perlu ditegur atau bahkan diskors (Suradi Hp. *et al.* 1986: 303-304). Penjabaran program Sapta Usaha Tama lainnya juga berkarakter strategis yang dijiwai oleh semangat membangun kemandirian, kedaulatan, dan nasionalisme siswa-siswi dan masyarakat luas.

Kebijakan yang lebih berorientasi strategis dan taktis tersebut disusul oleh Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tertanggal 17 Agustus 1961 yang menegaskan Pancasila dan dilengkapi oleh Manipol-USDEK sebagai sebagai asas pendidikan nasional. Di dalam instruksi tersebut terdapat Panca Wardhana yang diarahkan sebagai sistem pendidikan nasional yang berisikan 5 (lima) prinsip, yaitu (1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan, (2) perkembangan kecerdasan, (3) perkembangan emosional-artistik atau rasa

keharuan dan keindahan lahir-batin, (4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan (5) perkembangan jasmani. Selain itu ditambah penyelenggaraan "Hari Krida" untuk kegiatan kebudayaan, kesenian, olah raga dan permainan tiap hari Sabtu (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 202-203). Dalam penjelasan mengenai Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan nasional tersebut tiap-tiap prinsip diarahkan sebagai dasar dan acuan pengembangan kurikulum dan kebijakan pendidikan lainnya.

Instruksi menteri yang kemudian lebih dikenal dengan Panca Wardhana tersebut menjadi acuan dalam merestrukturisasi kurikulum, pembelajaran, dan program-program yang akan dapat mewujudkan cita-cita Manipol-USDEK. Hal pertama yang urgen adalah perombakan kurikulum, hal tersebut karena kurikulum adalah medium indoktrinasi ideologis (Apple, 2004: 77-97; Giroux, 1997: 86-92). Tentu saja dalam hal ini Manipol-USDEK menjadi materi utama yang harus segera dimasukkan dalam struktur kurikulum, baik secara eksplisit melalui mata pelajaran maupun secara implisit melalui kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) dalam wujud berbagai kebijakan pendidikan seperti program Saptta Usaha Tama dan sejenisnya. Mengacu pada lima prinsip Panca Wardhana maka kurikulum di sekolah ditelaah, dikategorisasikan, dan dikembangkan mengacu pada kelima prinsip tersebut.

Dalam menjalankan prinsip pertama dari Panca Wardhana misalnya di sekolah harus diajarkan pendidikan kewarganegaraan atau *Civics* yang dimulai dari materi mengenai sejarah kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu (sebelum hadir kolonialisme Belanda) dan juga Ilmu Bumi Nasional (sekarang geografi). Pada pelajaran *Civics* inilah indoktrinasi ideologis Manipol-USDEK terutama diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Prinsip kedua dijalankan melalui pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian prinsip ketiga dilaksanakan melalui pelajaran sastra, musik, menyanyi, menggambar, melukis, menari, bermain gamelan, dan lainnya. Prinsip keempat dikembangkan melalui pembelajaran pekerjaan

tangan/kerajinan, termasuk dengan bercocok tanam di halaman sekolah jika memungkinkan. Terakhir, prinsip kelima dijalankan melalui pembelajaran ilmu kesehatan dan olah raga. Selain itu praktik pembelajarannya juga diarahkan untuk kontekstual, yakni mengikuti kebutuhan lingkungan sekitar sekolah (Suradi Hp. *et al.* 1986: 340-342).

Secara umum Panca Wardhana tersebut tidak mengubah struktur kurikulum kecuali pada mata pelajaran *Civics* dan dijadikannya hari Sabtu sebagai hari Krida. Perubahan yang terjadi adalah penambahan isi (*content*), perubahan komposisi materi, susunan mata pelajaran, dan mulai adanya bimbingan dan konseling bagi siswa serta ujian-ujian (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 80; Suradi Hp. *et al.*, 1986: 131-132). Hal tersebut terjadi karena memang sebelumnya sekolah-sekolah sudah memiliki kurikulum walau tentu belum sempurna betul. Perubahan kurikulum tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, ia beresonansi dengan program-program kebijakan pendidikan lain. Dalam hal ini setidaknya terdapat 2 (dua) program yang mencolok dan dapat dikategorisasikan sebagai upaya pembaruan model sekolah pada waktu itu, yaitu (1) pengembangan Sekolah Dasar (SD) Gotong Royong dan (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Gaya Baru. Kedua program tersebut meniscayakan perubahan kurikulum.

Sekolah Dasar Gotong Royong diharapkan dapat menjadi sekolah percontohan di tiap Kecamatan. Prinsip pembelajaran kontekstual di sekolah yang digagas ini diberikan dalam bentuk mata pelajaran tambahan, seperti usaha tani, perikanan, peternakan, perbangkelan, dan pertukangan (Suradi Hp. *et al.* 1986: 131). Mata pelajaran-mata pelajaran tersebut bersinergi juga dengan program "usaha halaman" dari Saptta Usaha Tama dan sejenisnya. Sementara itu pada SMP Gaya Baru terdapat 4 (empat) kategori mata pelajaran, yaitu (1) kelompok dasar, terdiri dari *Civics*, Bahasa Indonesia, Sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti, dan Pendidikan Jasmani, (2) kelompok

cipta, berupa mata pelajaran yang mengasah keterampilan dan kejuruan, (3) kelompok rasa karya, bertujuan untuk membiasakan siswa dengan tuntutan Sosialisme Indonesia yang memiliki etos kerja tinggi, wawasan persatuan nasional yang kokoh dan patriotisme, dan (4) Krida, yaitu kegiatan ekstra yang memberi kesempatan luas bagi siswa untuk berkreasi dan mengembangkan karya mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah (Suradi Hp. *et al.* 1986: 132). Kategorisasi mata pelajaran tersebut juga terlihat mengacu pada prinsip-prinsip Panca Wardhana.

Di SMA perubahannya tidak berbeda jauh. Dalam arti sama-sama memperoleh materi pelajaran wajib *Civics* sebagai media utama indoktrinasi Manipol-USDEK di samping juga dilakukan restrukturisasi kurikulum. Perubahan kurikulum dengan masuknya indoktrinasi Manipol-USDEK melalui pelajaran *Civics* dan pelaksanaan Sapta Usaha Tama menjadikan upaya pembelajaran Manipol-USDEK tampak efektif. Hal tersebut karena indoktrinasi bukan hanya berupa materi dan ceramah-ceramah saja, atau melalui mata pelajaran sebagai pengejawantahan dari Panca Wardhana, melainkan berupa tindakan riil melalui berbagai program Sapta Usaha Tama yang akan mengubah cara pandang dan perilaku siswa. Bahkan untuk tujuan-tujuan politik tertentu sekolah diarahkan untuk berpartisipasi aktif mendukung langkah-langkah politik pemerintah. Hal tersebut wajar karena sejak mula dalam konsepsi Manipol-USDEK pendidikan adalah alat revolusi. Sebagai contoh siswa digerakkan untuk demonstrasi dan parade ketika pemerintah RI berkonfrontasi dengan Malaysia (Sjamsuddin *et al.* 1993: 80).

Lebih lanjut, indoktrinasi ideologis Manipol-USDEK paling gencar barangkali ditujukan untuk jenjang pendidikan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi struktur kurikulum pada dasarnya dirumuskan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Namun karena semua praktik pendidikan harus didasarkan pada visi Manipol-USDEK, oleh karenanya mata kuliah Pancasila dan Manipol-USDEK menjadi mata kuliah wajib. Mahasiswa yang

tidak lulus dalam mata kuliah ini tidak diperkenankan untuk ujian mengambil gelar sarjana muda maupun kesarjanaan (Sjamsuddin *et al.*, 1993: 98). Perguruan tinggi bahkan memiliki posisi khusus sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1961 mengenai perguruan tinggi, di dalam penjelasan umum terdapat penegasan bahwa perguruan tinggi adalah alat revolusi, tujuannya membentuk manusia susila yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan beradab (Suradi Hp. *et al.* 1986: 126).

Satu kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung tujuan tersebut adalah Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 62 Tahun 1963 tentang penghapusan pembayaran uang kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dalam keputusan tersebut dinyatakan: untuk membina perguruan tinggi ke alam Sosialisme Indonesia, maka uang kuliah di PTN dihapuskan (Poerbakawatja, 1970: 421). Tilaar (1995: 106-107) menambahkan bahwa Departemen PTIP ketika itu kemudian juga mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan sarjana yang berideologi Manipol namun ahli dalam bidang masing-masing untuk menunjang pembangunan, mengintensifkan penelitian dasar maupun terapan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mewajibkan untuk mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Mahasiswa dan dosen pun diminta untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk inisiasi proyek dengan masyarakat, *extension courses*, konsultasi, pendidikan orang dewasa dan lainnya.

Khusus berkaitan dengan indoktrinasi Manipol-USDEK juga digalakkan *Studium Generale* dan *Civics* di mana-mana. Kegiatan ini dijalankan secara massal bertujuan untuk mendapatkan respons dari masyarakat sebanyak mungkin mengenai Pancasila sebagai landasan ideal bangsa dan Manipol-USDEK sebagai interpretasi tunggalnya. Materi yang diberikan yaitu (1) falsafah negara Pancasila, (2) makna UUD 1945, (3) rangkaian hubungan antarnegara dan antarbangsa, khususnya dalam pengertian

Konferensi Asia-Afrika, (4) konsepsi Presiden mengenai Manipol sebagai haluan Negara, dan (5) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin sebagai dasar pembentukan masyarakat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, mufakat (Masyarakat Sosialisme ala Indonesia yang anti-kapitalisme dan anti-liberalisme) (Suradi Hp. *et al.* 1986: 119-120). Walau begitu perguruan tinggi tetap menyelenggarakan pengiriman mahasiswa ke luar negeri, namun tetap dengan pengawasan ketat baik pelajarannya maupun kesetiaannya pada Manipol-USDEK (Tilaar, 1995: 107-108).

Lebih lanjut, selain Panca Wardhana pada awal tahun 1960-an juga lahir Rencana Pendidikan pada tahun 1964. Substansinya berisi (1) pengembangan sekolah-sekolah, terutama sekolah dasar agar relevan dengan kehidupan rakyat, hingga dapat menjadi alat meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 4 Tahun 1950, (2) perlunya mewujudkan cita-cita kebudayaan bangsa Indonesia menjadi dasar pendidikan nasional melalui pengajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, sejarah nasional, agama, adat-istiadat, (3) perlunya Indonesia mengejar ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan, khususnya sains dan matematika, (4) perlunya penataan didaktik-metodik pengajaran di sekolah-sekolah menggunakan model yang menempatkan siswa sebagai subjek proses belajar, di mana ia mampu berpikir kritis secara ilmiah, juga kreatif, dan mampu memecahkan masalah, dan (5) evaluasi umum terhadap kebijakan Rencana Pelajaran 1947 dan Rencana Pelajaran Terurai 1952 (Suradi Hp. *et al.* 1986: 128).

Rencana Pendidikan 1964 adalah bagian dari upaya rezim demokrasi terpimpin Soekarno dalam memperbaiki terus-menerus dan membangun satu fondasi sistem pendidikan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia. Dengan demikian orientasi ideologis Manipol-USDEK agar dapat tercapai harus ditunjang dengan pendekatan, strategi, metode, dan model-model pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, pengembangan dan pemilihan metode dan model pembelajaran

tidak bisa sembarangan, melainkan dikalkulasi dengan pertimbangan agar dapat mendorong tercapainya orientasi ideologis Manipol-USDEK. Ideologi oleh karenanya dapat dikatakan memengaruhi pemilihan pendekatan pembelajaran hingga praktiknya di ruang-ruang kelas.

Berbeda dengan masa demokrasi liberal yang relatif longgar hingga orientasi ideologis nasionalisme dan demokrasi serta anasir nilai-nilai liberal banyak dipengaruhi dari luar institusi pendidikan, di masa demokrasi terpimpin baik dari dalam institusi pendidikan berupa program-program (misalnya seperti, Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana), kurikulum, dan praktik pembelajaran, maupun dari luar berupa propaganda sangat kuat dan potensial secara efektif memengaruhi cara pandang dan perilaku siswa.

Terlepas dari analisis ideologis tersebut, jika dicermati, Rencana Pendidikan 1964 tampak menjadi pelengkap kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam beberapa sisi justru beberapa kebijakan tersebut tampak tumpang tindih satu sama lain, karena pada dasarnya semuanya diarahkan untuk mengarahkan pendidikan sebagai alat revolusi berpegang pada semangat Manipol-USDEK. Lihat saja substansi Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 khusus yang membahas pendidikan, juga Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana, dan beberapa kebijakan operasional lain relatif senada dan saling melengkapi. Hal yang relatif berbeda dari Rencana Pendidikan 1964 adalah orientasi untuk menata pendekatan pembelajaran dan evaluasi terhadap kebijakan rancangan kurikulum dan pembelajaran sebelumnya (1947 dan 1952). Upaya tersebut kelak dikoreksi oleh rezim Orde Baru dan menghasilkan kurikulum 1968. Beberapa sisi Rencana Pendidikan 1964 dengan demikian memang lebih bersifat betul-betul menata substansi pembelajaran, bukan semata-mata seperti beberapa kebijakan sebelumnya yang lebih dominan orientasi ideologis Manipol-USDEK-nya.

Penerbitan beberapa kebijakan yang sifatnya tidak serentak, melainkan bertahap untuk saling melengkapi, menunjukkan

pemerintah memang masih mencari format terbaik untuk membangun fondasi sistem pendidikan yang kokoh. Upaya tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 19 Tahun 1965 mengenai pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila yang berisi dasar, asas, tujuan, isi moral dan politik pendidikan nasional. Sekali lagi dalam kebijakan tersebut ditegaskan bahwa tugas pendidikan nasional dalam revolusi Indonesia adalah sebagai penghimpun kekuatan progresif revolucioner berporoskan Nasakom. Ditegaskan juga bahwa dalam merumuskan kurikulum harus dijiwai: (1) semangat mengembangkan amanat penderitaan rakyat demi tercapainya masyarakat adil makmur yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa, (2) semangat demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyawarah mufakat, (3) semangat cinta tanah air dan kesatuan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, berkepribadian dan berkebudayaan nasional, (4) rasa perikemanusiaan dalam bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia atau semangat New Emerging Forces (NEFO) untuk membangun dunia baru yang bebas dari imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme, dan (5) kepercayaan dan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia (Tilaar, 1995: 102).

Penetapan tersebut dikuatkan dengan pembentukan Majelis Pendidikan Nasional (MPN) melalui Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1965. MPN didesain sebagai lembaga Negara tertinggi yang langsung berada di bawah pimpinan Presiden dan mempunyai wewenang menentukan kebijakan pendidikan dalam segala bidang. Presiden bahkan mengangkat sendiri dirinya sebagai penyayom agung MPN (Tilaar, 1995: 102). Hanya saja baik Penetapan Presiden mengenai pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila maupun MPN tidak dapat berjalan, karena rezim kekuasaan Soekarno berakhir pada tahun 1966. Periode berikutnya, melalui masa transisi yang sangat tragis semua kebijakan yang telah dihasilkan dibatalkan oleh rezim berikutnya, terutama kebijakan yang langsung berkaitan dengan Manipol-USDEK

sebagai satu-satunya interpretasi tunggal atas Pancasila dalam semua bidang, termasuk pendidikan. Perkecualiannya adalah undang-undang pendidikan tinggi yang masih berlaku hingga beberapa lama dan Rencana Pendidikan 1964 yang diarahkan sebagai batu pijak evaluasi dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran periode berikutnya.

Pemerintahan Presiden Soekarno dibawah diktum demokrasi terpimpin yang ruhnya sebenarnya adalah sosialisme Indonesia memang dijalankan secara ketat, masif, terkontrol dari atas ke bawah, hingga tampak bahwa semua gagasan dan orientasi ideologis sosialisme Indonesia dicoba dijabarkan melalui banyak kebijakan untuk membangun satu sistem pendidikan baru yang lepas dari anasir kolonialisme dan liberalisme. Perubahan kurikulum, lahirnya inisiasi SD Gotong Royong, juga SMP dan SMA Gaya Baru, serta reorientasi perguruan tinggi yang kental nuansa Manipol-USDEK menunjukkan bahwa indoktrinasi ideologis terjadi betul melalui dunia pendidikan. Fenomena ini berbeda dibanding pada masa demokrasi liberal yang relatif longgar hingga kontestasi ideologi terjadi pada tataran kebijakan dan praktik pendidikan. Di era demokrasi terpimpin hampir-hampir semua anasir ideologi lain, yakni berbeda dari Manipol-USDEK tidak diberi ruang bernafas. Ruang publik perbincangan masyarakat Indonesia waktu itu penuh dengan jargon revolucioner Soekarno.

SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin (1950-1965) merupakan masa yang menunjukkan peralihan dari masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan sejak 1945-1949. Oleh karena itu sistem pendidikan di masa demokrasi liberal belum stabil betul. Beberapa kebijakan pada waktu itu lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam melayani kebutuhan belajar masyarakat banyak. Sistem demokrasi liberal di ternyata justru menjadikan upaya membangun fondasi sistem pendidikan

yang kuat terhambat. Jatuh bangun kabinet karena konflik kepentingan banyak partai menjadikan program-program pendidikan terabaikan. Salah satu sebab yang patut dikemukakan adalah elemen-elemen bangsa waktu itu belum siap untuk berdemokrasi secara liberal, karena banyaknya partai dan kepentingan waktu itu. Di sisi lain, demokrasi terpimpin sangat kuat cengkeramannya pada dunia pendidikan. Fondasi sistem pendidikan mulai dibangun didasarkan pada doktrin Manipol-USDEK sebagai satu-satunya penafsiran yang boleh atas Pancasila. Kepentingan politik ideologis waktu itu sangat dominan.

Kedua, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin membuktikan bahwa ideologi sangat memengaruhi arah pengembangan sistem pendidikan nasional. Orientasi ideologis nasionalisme dan demokrasi ditekankan secara eksplisit pada UU No. 4 Tahun 1950. Kedua orientasi tersebut di lapangan saling berkontestasi dengan orientasi ideologis liberalisme dan kapitalisme yang masuk karena longgarnya iklim politik waktu itu. Pada masa demokrasi terpimpin ideologi sosialisme sangat kental pengaruhnya terhadap arah pengembangan sistem pendidikan nasional. Doktrin Manipol-USDEK dijabarkan melalui kebijakan Sapta Usaha Tama, Panca Wardhana, dan kebijakan-kebijakan operasional pendidikan lainnya hingga berimbang pada perubahan kurikulum dan orientasi pendekatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Pada masa ini ideologi sosialisme sangat dominan yang berupaya untuk menyingkirkan paham kolonialisme, imperialisme, kapitalisme, dan liberalisme dengan kembali pada semangat perjuangan revolusioner 1945 dan Pancasila.

Ketiga, ideologi-ideologi yang saling berkontestasi di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin memengaruhi arah pengembangan sistem pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan dan program-program pendidikan. Secara eksplisit bahkan di era demokrasi terpimpin, pendidikan dijadikan alat penggerak revolusi menuju Sosialisme

Indonesia. Dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan menjadi tangan dan kaki yang memastikan agar ideologi dapat bergerak dan berjalan di tataran praktik. Pada waktu itu restrukturisasi sistem pendidikan, perubahan kurikulum, dan reorientasi pendekatan pembelajaran menjadi cara dan medium untuk mencapai visi ideologis, baik demokrasi, nasionalisme, maupun sosialisme. Program penataan sistem misalnya dilakukan dengan mengagitas SD Gotong Royong dan SMP-SMA Gaya Baru. Pada ranah kurikulum, ideologi mewujud dalam bentuk materi yang diletakkan secara formal pada dokumen tertulis rencana pembelajaran dan di sisi lain mewujud dalam bentuk kurikulum tersembunyi berupa nilai-nilai, kultur, dan tradisi yang dihidupkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Beberapa program yang menjadi medium kurikulum tersembunyi tersebut antara lain program Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana. Pada ranah pembelajaran, ideologi tidak langsung menampakkan diri, kecuali demokrasi. Ideologi sosialisme, nasionalisme, dan liberal dijalankan dan diupayakan untuk dicapai melalui pemilihan pendekatan, metode, dan model-model pembelajaran yang tepat, yakni yang sekiranya akan menunjang tercapainya visi ideologis beberapa orientasi ideologi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. (2004). *Ideology and Curriculum*. 3rd Edition. New York & London: RoutledgeFalmer.
- Aronowitz, S. & Giroux, H. (1987). *Education Under Siege: The Conservative, Liberal, and Radical Debate Over Schooling*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Giroux, H. (1983). *Theory and Resistance in Education: A Pedagogy for the Opposition*. Massachusetts: Bergin & Garvey Publisher, Inc.
- Giroux, H. (1997). *Pedagogy and the Politics of Hope: Theory, Culture, and Schooling*. Colorado & Oxford: Westview Press.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Jasin, A. (1987). *Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar Sejak Proklamasi Kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka.

- McVey, R.T. (1990). Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution. *Indonesia*, (50), 5-27. doi: 10.2307/3351228
- Mestoko, S., Bachtiar, S., Sunityo, & Arif, Z. (1986). *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerbakawatja, S. (1970). *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- Riklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Sjamsuddin, H., Sastradinata, K., & Hasan, S.H. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Subkhan, E. (2017). Merintis Ilmu Pendidikan Berfilosofi Pancasila yang Memerdekakan. Dalam M., Marbawi dan J., Paat. (Eds.). *Tinjauan secara Kritis Reformasi Pendidikan Nasional: 85 Tahun Tribute to Prof. H.A.R. Tilaar*. Jakarta: Media Indonesia Publishing, 103-130.
- Suradi Hp., Safwan, M., Latuconsina, D., & Samsurizal. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tilaar, H.A.R. (1995). *Lima Puluh Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tsuchiya, K. (1992). *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*. Jakarta: Balai Pustaka.